

Aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Transisi Energi Berkeadilan

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Jakarta, 25 Juli 2024

Kesetaraan gender dalam platform iklim dan transisi energi

- **The International Labor Organization (ILO):** A just transition can ensure that **women are not left behind and that their existing and potential contributions**, essential for stimulating green growth and achieving sustainable development for all, are not undermined.
- **The World Economic Forum:** a timely transition towards a more inclusive, sustainable, affordable, and secure energy system that provides solutions to global energy-related challenges while creating value for business and society. **Meaningful progress will only be achieved by an inclusive approach** providing energy security and access while facilitating economic growth and development.
- **SDG 5:** Gender equality and the empowerment of all women and girls. **SDG 7:** ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.



Kesetaraan gender dalam platform iklim dan transisi energi

- **Enhanced NDC 2021:** Komitmen untuk mengurangi emisi dengan **menjamin partisipasi para pemangku kepentingan seperti** sektor swasta, masyarakat sipil, kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat/Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan maupun tahapan implementasi.
- **Bali Energy Transition Roadmap G20:** Dalam Pilar Dua isu prioritas peningkatan teknologi energi cerdas dan bersih, salah satu strateginya dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan pedoman utama untuk transisi energi yang adil dan inklusif pada aspek, pertama, ketenagakerjaan dan pekerjaan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta pelibatan masyarakat; kedua, **kesetaraan gender** dan aspek perilaku serta kualitas hidup.
- **JETP:** Transisi energi di mana risiko dan peluang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan didistribusikan secara adil di antara para pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas dan kondisi mereka, sehingga **para pemangku kepentingan yang rentan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan** yang dapat memitigasi risiko dan mendapatkan manfaat dari peluang yang ada.

Komitmen pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Konvensi untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)
- Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD)
- UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamankan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan afirmasi terhadap kelompok rentan dan perlakuan non-diskriminatif

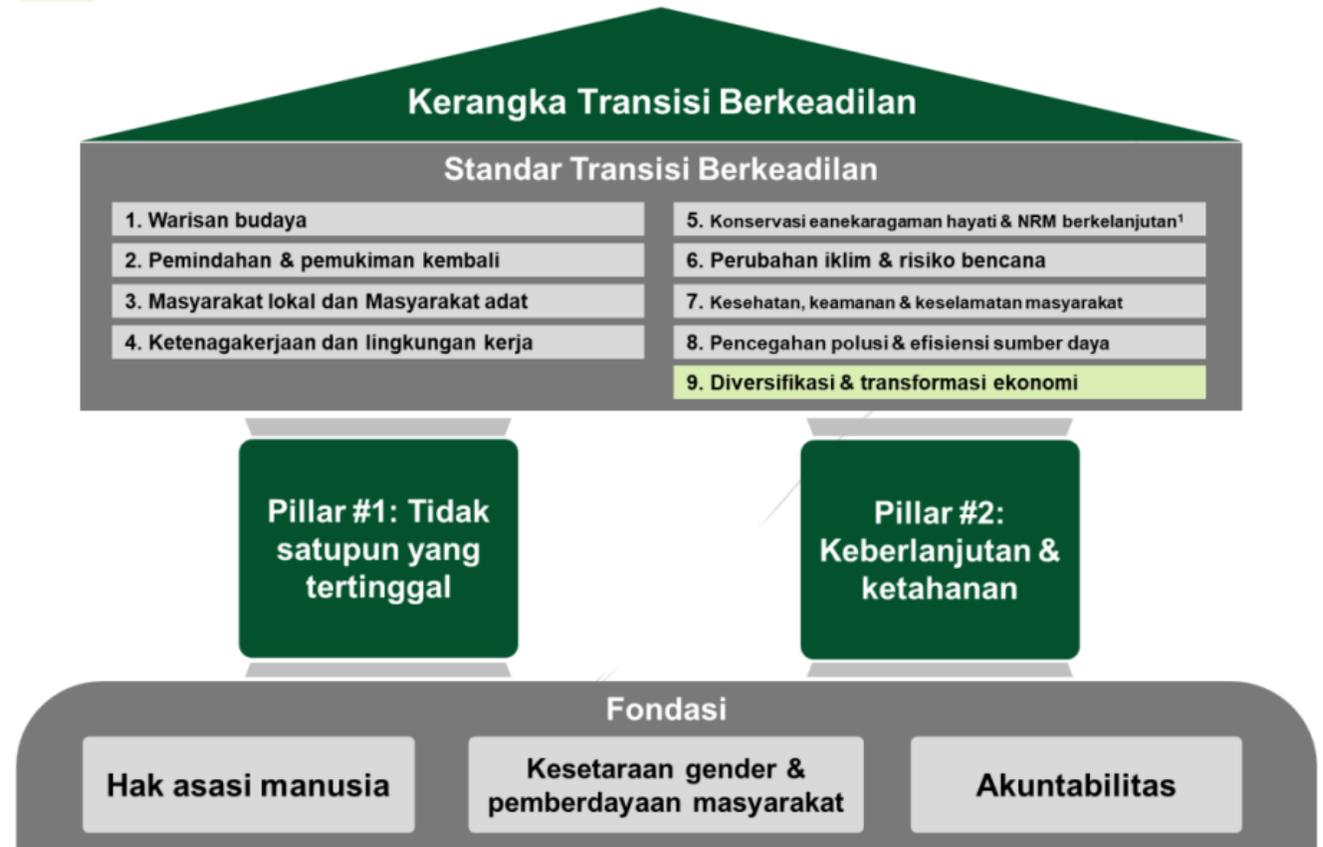


♀ CEDAW
THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Kerangka transisi berkeadilan

- Fungsi prinsip dan penerapan aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat:
 - ✓ pentingnya partisipasi bermakna dan adil dalam mengakses sumber daya program maupun menerima manfaat sosial dan ekonomi
 - ✓ mendorong kesetaraan dan pemberdayaan gender terhadap kelompok rentan khususnya perempuan
 - ✓ melakukan upaya dalam menekan risiko kekerasan berbasis gender dan pelecehan sebagai dampak dari adanya suatu program transisi

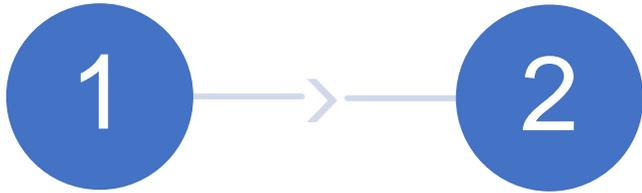
Arsir hijau muda menunjukkan bagian dari kerangka Transisi Berkeadilan yang merupakan tambahan dari Upaya perlindungan yang ada



1. NRM adalah manajemen sumber daya alam

Sumber: (Analisis JETP, 2023)

Konsepsi GEDSI



GEDSI mengacu pada hasil yang dicapai oleh perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota kelompok rentan secara sosial dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh laki-laki dari kelompok etnis utama yang berkuasa (ADB).

GEDSI juga mengacu pada hasil yang berkontribusi terhadap perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki serta norma seputar peran gender/hubungan gender (ADB).

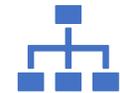


- Kesetaraan dan non-diskriminasi
- Inklusi
- Interseksionalitas
- Partisipasi dan pemberdayaan
- Aksesibilitas, kontrol, dan manfaat
- Penghapusan kekerasan



Project level

Mengintegrasikan ke dalam setiap langkah dalam setiap siklus proyek



Organisational level

Mengintegrasikan ke dalam kebijakan, struktur, dan budaya organisasi

Interseksionalitas perempuan dan penyandang disabilitas

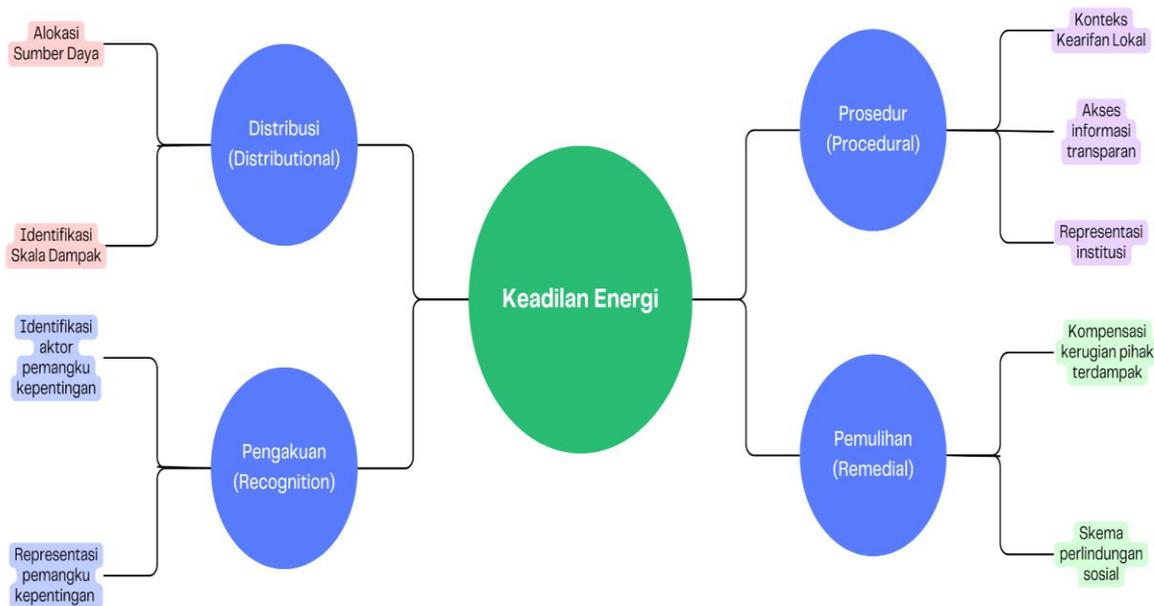
- Perempuan mudah terdampak dengan aktivitas energi (Moniruzzaman & Day, 2020) maupun kemiskinan energi (Pueyo, Maestre & Robinson, 2019).
- Perempuan berpotensi mendapat kerentanan berlapis (*double discrimination/double burden*) akibat konstruksi sosial tidak adil gender.
- Perempuan dengan disabilitas rentan mendapat diskriminasi yang lebih besar dari laki-laki baik yang merupakan penyandang maupun bukan penyandang disabilitas (Okyerem & Lin, 2023).
- PBB menyebutkan kondisi perempuan lebih buruk karena akses yang tidak setara terhadap sumber daya dan aset produktif maupun layanan publik (pendidikan/kesehatan/sanitasi).
- Rekomendasi umum CEDAW no. 34 juga menyebutkan terjadinya praktik kekerasan yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan di daerah pedesaan.



Potensi risiko dari pelaksanaan transisi energi

- Bagaimana menurunkan insiden kekerasan berbasis gender sebagai akibat dari perubahan sosial yang terkait dengan transisi energi?
- Bagaimana menurunkan potensi diskriminasi berbasis gender dalam bentuk upah, kompensasi, dan akses pekerjaan yang tidak setara dalam transisi energi?
- Bagaimana meminimalisir dampak transisi energi terhadap kerusakan ekosistem, lingkungan, dan mata pencaharian yang merugikan perempuan dan kelompok rentan lain?
- Bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lain dalam proses pengambilan keputusan transisi energi sehingga tidak menimbulkan dampak diskriminatif pada kelompok rentan?

Pengarusutamaan GEDSI dalam transisi energi berkeadilan



- Dalam merumuskan prinsip GEDSI dalam transisi energi berkeadilan, **pertama**, indikator *Regional Resource Centre for Asia and the Pacific (RRCAP)* dalam melihat pengarusutamaan GEDSI dalam perubahan iklim. **Kedua**, konsep keadilan energi dari Sovacool dan Dworkin (2015) serta Jenkins et al (2016). **Ketiga**, indikator akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat (AKPM) dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. **Keempat**, mengadopsi platform *Social Accountability (GPSA)* khususnya pada aspek mekanisme pengaduan.

Prinsip	Unsur material
Partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan	AKPM – Kontrol dan partisipasi Keadilan prosedural Keadilan pengakuan
Keadilan ekonomi	AKPM – Manfaat, Partisipasi, Akses Keadilan distribusi Keadilan remedial
Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi	AKPM – Akses Keadilan Prosedural Keadilan Distribusi
Integrasi sosial-budaya	AKPM – Kontrol dan Partisipasi Keadilan Pengakuan
Mekanisme remedial dan pengakuan	AKPM – Akses dan kontrol Keadilan prosedural Keadilan pengakuan

Indikator pengarusutamaan GEDSI dalam transisi energi

Partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan

- Pengakuan terhadap hak-hak kelompok rentan sehingga menjamin keterwakilan mereka di dalam proses.
- Kontrol terhadap pemberian persetujuan atau tidak (*inform consent*).
- Tersedianya data terpilah berdasarkan gender, kelompok penyandang disabilitas, lansia, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya sebagai modal *stakeholder mapping*.
- Kontrol terhadap pilihan teknologi dan format yang dipakai sehingga dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas dan tidak hanya menjadi penerima manfaat.
- Jaminan atas mekanisme kelembagaan, khususnya yang disediakan oleh pemerintah, dalam membuka ruang partisipasi publik.
- Mendorong partisipasi bermakna dalam proses kebijakan, konsultasi publik, dan berbagai forum terkait lainnya.
- Peningkatan kapasitas bagi kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses transisi energi.
- Sarana dan prasarana yang disediakan untuk memudahkan dan menjamin kehadiran kelompok rentan (waktu, frekuensi, pendamping, akomodasi, dan transportasi).

Keadilan ekonomi

- Jaminan pada akses pemenuhan kebutuhan dasar akibat perubahan ekologis.
- Keberlanjutan pada sumber mata pencaharian.
- Potensi lapangan pekerjaan baru dan jaminan pemenuhan hak dalam bekerja untuk kelompok rentan.
- Adanya *care economy* atau tersedianya akses pengasuhan bagi perempuan yang ingin kembali bekerja tanpa menelantarkan anaknya.
- Mitigasi resiko kebencanaan yang berdampak pada terputusnya sumber ekonomi.
- Kebijakan afirmasi untuk melindungi kelompok rentan dalam ketidakadilan kompetisi di pasar kerja.
- Jaminan akses pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan publik yang berkeadilan.
- Jaminan akses pada subsidi dan program bantuan pemerintah lainnya.
- Menekan risiko *gender pay gap* sebagai perbaikan dari kesenjangan di sektor energi dan STEM.
- Mendapatkan jaminan subsidi atas produk konversi/transisi energi.
- *Gender budget tagging* untuk kelompok perempuan di tingkat lokasi.
- Proporsi pembiayaan transisi energi untuk pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.
- Proyek transisi energi menggunakan model kepemilikan kolektif.
- Sumber energi mengutamakan komoditas lokal.

Indikator pengarusutamaan GEDSI dalam transisi energi (2)

Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Transparansi anggaran.• Menjalankan aksi afirmasi terhadap kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta proses pengambilan keputusan dan perekrutan tenaga kerja.• Akses terhadap jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan).• Pemberdayaan kelompok rentan dalam mengembangkan potensi energi alternatif.• Jaminan terhadap pemerataan intragenerasi atas keberlanjutan lingkungan.• Pengakuan terhadap hak kepemilikan atas sumber daya alam (air, tanah, hutan, dll) termasuk hak masyarakat adat.• Mitigasi dan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, udara, dan tanah.• Kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan teknologi.• Akses terhadap informasi termasuk rencana proyek, lokasi, dan dokumen analisis dampak.
--	--

Integrasi sosial-budaya	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi dan mendobrak stereotip.• Mitigasi dan solusi untuk mencegah eksploitasi, <i>sexual abuse</i>, dan <i>sexual harassment</i>.• Proses transisi energi mempertimbangkan kesenjangan pedesaan-perkotaan serta kepercayaan atau kebiasaan masyarakat yang membutuhkan waktu atau metode pendekatan yang berbeda dan khusus.
--------------------------------	--

Mekanisme pengaduan dan remedial	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan mekanisme komplain yang adil dan dapat diakses oleh masyarakat dalam melakukan mitigasi dampak pembangunan, baik dari penyelenggara negara maupun pelaksana proyek.• Mitigasi kebencanaan termasuk dampak yang meluas bagi kesehatan publik.• Mitigasi dampak ekonomi, sosial, lingkungan, melalui platform <i>complaint handling mechanism</i> yang terpadu.• Mitigasi kebencanaan dari pelaksanaan konversi energi.• Mitigasi resiko atas pilihan teknologi yang dipakai oleh masyarakat.
---	--

Terima kasih 😊

PWYP Indonesia
www.pwypindonesia.org

Link publikasi PWYP Indonesia terkait GEDSI dan transisi energi:

1. [https://pwypindonesia.org/id/panduan-pemantauan-
implementasi-kesetaraan-gender-disabilitas-dan-inklusi-sosial-
gedsi/](https://pwypindonesia.org/id/panduan-pemantauan-implementasi-kesetaraan-gender-disabilitas-dan-inklusi-sosial-gedsi/)
2. [https://pwypindonesia.org/id/perspektif-perempuan-terhadap-
perencanaan-pembangunan-dan-pemanfaatan-listrik-dalam-
proyek-transisi-energi/](https://pwypindonesia.org/id/perspektif-perempuan-terhadap-perencanaan-pembangunan-dan-pemanfaatan-listrik-dalam-proyek-transisi-energi/)
3. [https://pwypindonesia.org/id/pengarusutamaan-kesetaraan-
gender-disabilitas-dan-inklusi-sosial-gedsi-dalam-transisi-energi-
berkeadilan-di-indonesia/](https://pwypindonesia.org/id/pengarusutamaan-kesetaraan-gender-disabilitas-dan-inklusi-sosial-gedsi-dalam-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/)
4. [https://pwypindonesia.org/id/pelibatan-komunitas-dalam-
transisi-energi-berkeadilan-melalui-implementasi-eiti-di-
indonesia/](https://pwypindonesia.org/id/pelibatan-komunitas-dalam-transisi-energi-berkeadilan-melalui-implementasi-eiti-di-indonesia/)